

Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Hutan Lindung REG. 20 Kabupaten Pesawaran

Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Hutan Lindung REG. 20 Kabupaten Pesawaran

Bina Unteawati, Fitriani, dan M. Zaini

Politeknik Negeri Lampung

ABSTRACT

Motivation in economical needs of the society to have some areas of land is a reason of high forest exploitation activity. Thus, the solution of forest exploitation problem cannot be separated from fulfilling social economic needs of the society. Economical need as a major motivation of exploiter should be fulfilled through optimalization of non wood _alternative income. The availability of income sources for exploiter would stop them doing any activity in the forest. This research is conducted to study the social economic condition of the society in making use of the forest_ and to know their perception of important roles of forest. The society is responsible in forest rehabilitation. The results of this research about social economic condition of the society could be used to generate solution of the forest exploitation problem, without ignoring their income sources. The research is conducted at forest area Reg. 20 with Desa Gayau as the sample, for 4 months, from August until November 2014. The result shows, almost half of the society (30%) at Reg. 20 area have not been succeeded financially. The economic condition motivate them to exploit the forest to fulfilled their economical needs. Meanwhile, good agroforestry practice is could not possible to be implemented there. The social infrastructure condition of the society at Reg. 20 area has not been encouraging the continuity of forest rehabilitation. Social organization has not been formed. The society is organized by village authority. The group of farmer has not been created. This condition challenges the forest rehabilitation activity of the society.

Key words: forest utilizer, agroforestry, social, economy

Diterima: 10 April 2015, disetujui 24 April 2015

PENDAHULUAN

Wilayah teritori Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KKPHL) Kabupaten Pesawaran Kawasan dalam mengelola hutan nasional yang berada di bawahnya meliputi: 1) Hutan Produksi Register 18 Titi Bungur seluas 1.955 Ha; 2) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 seluas 21.929,31 Ha; 3) Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato seluas 7.954, 70 ha; dan 4) Hutan Lindung Register 21 Perentian Batu seluas 4.631,76 ha. Kabupaten Pesawaran memiliki potensi lahan kawasan non budidaya di kawasan hutan mencapai ± 36.490,77 ha. Wilayah tersebut merupakan kawasan hutan industri dan hutan lindung (Pemb. Pesawaran, 2010).

Kawasan hutan lindung Reg. 20 Pematang Kubuato dan Reg. 21 Perintian Batu telah menjadi wilayah perambahan hutan. Aktivitas perambahan hutan tersebut telah mencapai luasan 2.600 ha. Menurut Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pesawaran, saat ini 80% tutupan kawasan kawasan hutan lindung wilayah Pesawaran telah mengalami kerusakan (Koran Editor, 2014). Rangkaian aktivitas perambahan, illegal logging, penambangan liar secara terus menerus menyebabkan ekosistem dan mengancam fungsi hutan. Fungsi utama hutan lindung adalah sebagai sistem perlindungan, penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Siklus hidrologi di dunia ini dijaga oleh keberadaan kawasan hutan lindung. Kondisi tersebut apabila berlangsung terus menerus dapat memperparah kerusakan hutan dan mengancam fungsi pokok hutan lindung. Lebih lanjut akan menyebabkan terjadinya upaya terstruktur dan sistemik degradasi kawasan hutan. Kerusakan kawasan hutan lindung secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan alam, ekosistem, lingkungan, dan lebih lanjut akan mengancam keseimbangan kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian Alam (2008) kondisi sosial ekonomi petani mempengaruhi petani mengkonversi hutan untuk aktivitas perladangan berpindah. Tekanan ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung akan mendorong mereka memperluas garapan di kawasan hutan lindung (Subarna, 2012). Penelitian CIFOR (2000) menunjukkan bahwa kondisi tekanan ekonomi yang diakibatkan krisis ekonomi global dan regional juga turut berpengaruh terhadap tingkat perluasan lahan garapan di hutan, sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas perambahan hutan. Penelitian Zulaifah (2006) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas diversifikasi pemanfaatan sumberdaya hutan, mengembangkan produk baru, perbaikan harga produk dari diversifikasi pemanfaatan sumberdaya hutan, perbaikan sistem pengelolaan hutan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa hutan serta ketegasan hukum. Oleh karena itu, masyarakat pemanfaat hutan didorong untuk melakukan aktivitas praktik eksplorasi hutan dengan prinsip kelestarian (*good agroforestry practice*). Pendekatan partisipatif bagi masyarakat perambah lebih menjadi pilihan yang dapat dilakukan untuk mengelola hutan secara lestari.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Melakukan eksplorasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pemanfaat hutan, (2) Menggali persepsi masyarakat terhadap peran hutan di sekitar Reg. 20 Pematang Kubuato, dan (3) Menelusuri rantai aktivitas ekonomi masyarakat pemanfaat hutan di sekitar Reg. 20 Pematang Kubuato.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian dipilih dengan sengaja (*purposive*) yaitu Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, dimulai bulan Agustus s.d. November 2014.

Data primer dari responden untuk penelitian diperoleh menggunakan kuesioner. Pendekatan survei, *deep interview* terhadap tokoh kunci, dan *Focus Group Discussion* terhadap penjangkaran hambatan dan solusi persoalan sosial dan ekonomi yang selaras dengan rehabilitasi hutan. Metode tersebut dipilih untuk menggali kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Metode ini bermanfaat dalam menangkap fenomena aktual yang terjadi di lapangan. Sampling responden dilakukan terhadap 5% dari populasi penduduk secara *purposive*.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pemanfaat hutan. Indikator sosial meliputi: kondisi infrastruktur fasilitas umum; pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, informasi, dan organisasi kemasyarakatan; aktivitas adat, kebiasaan, budaya, norma dan nilai yang dianut masyarakat setempat; Indikator ekonomi meliputi: jumlah anggota keluarga, sumber

pendapatan rumah tangga, produksi dan alokasi tenaga kerja, konsumsi, kondisi infrastruktur ekonomi pasar, pedagang, pemasok, produsen dan konsumen, serta alur komoditas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosial dan ekonomi masyarakat pemanfaat hutan

Berdasarkan BPS Pesawaran (2013), hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran 397.294 jiwa, yang terdiri atas 204.934 laki-laki dan 192.360 perempuan (*sex ratio*) sebesar 106, artinya setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran per tahun pada kurun dekade terakhir (tahun 2000-2010) adalah 1,29 persen. Luas lahan kawasan non budidaya di Kabupaten Pesawaran adalah sebesar ± 36.490,77 Ha, terdiri dari: (1) Hutan Produksi Register 18 Titi Bungur seluas 1.955 ha, (2) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 seluas 21.929,31 ha, (3) Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato seluas 7.954,70 ha, (4) Hutan Lindung Register 21 Perentian Batu seluas 4.631,76 ha

Kesatuan Kantor Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kab. Pesawaran merupakan KPHP Model Unit Pesawaran sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.438/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012. Kebijakan KPHL ditetapkan untuk koordinasi dan sinergi kegiatan, antara lain dilakukan dengan instansi terkait baik Pemerintah Kabupaten Pesawaran, instansi di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat serta pihak-pihak swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPHL Pesawaran. Wilayah pengelolaan KPHL Pesawaran sebagai berikut:

Tabel 1. Wilayah pengelolaan KPHL Pesawaran

No.	Kawasan Hutan	Luas	Wilayah Administrasi
1.	HL Reg. 20 Pematang Kubuato	7,050 Ha	Kec. Padang Cermin, Punduh Pidada, Marga Punduh
2.	HL Reg. 21 Perintian Batu	2,504 Ha	Kec. Kedondong
3.	HP Reg. 18 Tangkit Titi Bungur	1,350 Ha	Kec. Tegi Neneng, Negeri Katon
Total Luas		10,903 Ha	

Sumber: KPHL Pesawaran, 2014

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kesatuan Kantor Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kab. Pesawaran mengelola kawasan hutan lindung di Reg. 20 Pematang Kabuato dan Reg. 21 Perintian Batu. Selain kawasan hutan lindung, juga mengelola kawasan hutan produksi Register 18 Tangkit Titi Bungur.

Luas kawasan Reg. 20 Pematang Kabuato mencapai 7.050 ha, yang terdiri terdapat 17 desa yang terbagi dalam 5 kecamatan. Kecamatan yang berada di Kawasan Reg. 20 Pematang Kabuato meliputi Kecamatan Punduh Pidada (5 desa), Padang Cermin (4 desa), Kedondong (3 desa), Tegineneng (3 desa), dan Negeri Katon (2 desa). Kepala Keluarga yang tinggal di wilayah tersebut mencapai 13.672 KK atau 51.396 jiwa.

Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Permasalahan yang muncul adalah karena adanya penggarapan lahan oleh masyarakat seluas + 1.300 ha. Penggarapan oleh masyarakat sebagian besar diperuntukkan untuk budidaya tanaman

kakao dan buah-buahan. Data Desa di Sekitar Kawasan Reg. 20 Pematang Kabuato dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Desa di Sekitar Kawasan Reg. 20 Pematang Kabuato

No	Desa	Kecamatan	(KK)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio	Luas Desa (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1	Suka Maju	Punduh Pidada	432	913	768	1.681	119	11,4	147,5
2	Bawang	Punduh Pidada	346	712	629	1.340	113	7,5	178,7
3	Batu Raja	Punduh Pidada	447	804	671	1.475	120	11,89	124
4	Penyandingan	Punduh Pidada	429	832	709	1.541	117	12,33	124,9
5	Maja	Punduh Pidada	838	1.712	1.473	3.184	116	15,17	209,9
6	Gayau	Padang Cermin	404	723	643	1.366	112	7,2	189,7
7	Durian	Padang Cermin	385	799	710	1.508	113	21,22	71,1
8	Banjaran	Padang Cermin	1.113	2.218	2.048	4.266	108	11,01	387,5
9	Bunut Seberang	Padang Cermin	713	1.495	1.365	2.860	110	20	143
10	Babakan Loa	Kedondong	530	1.116	1.019	2.136	109	1,35	1.582,20
11	Bayas Jaya	Kedondong	771	1.704	1.447	3.151	118	5,26	599,1
12	Sinar Harapan	Kedondong	1.340	2.703	2.470	5.173	109	6,59	784,9
13	Gedung Gumanti	Tegi Neneng	1.177	2.305	2.125	4.430	108	19,35	228,9
14	Kresno Widodo	Tegi Neneng	1.834	3.185	3.122	6.308	102	12,16	518,7
15	Tri Mulyo	Tegi Neneng	1.448	2.841	2.636	5.477	108	10,07	543,9
16	Sinar Bandung	Negeri Katon	561	1.101	1.060	2.161	104	3,5	617,5
17	Tri Rahayu	Negeri Katon	904	1.718	1.621	3.339	106	7,5	445,2
J U M L A H			13.672	26.881	24.516	51.396	110	183,5	280,1

Sumber: KPHL Pesawaran, 2014

Empat desa di wilayah Kecamatan Padang Cermin meliputi Desa Gayau, Banjaran, Durian, dan Bunut Sebrang. Secara *purposive* Desa Gayau menjadi wilayah sampling kondisi sosial ekonomi masyarakat pemanfaat hutan. Hasil rekapitulasi kondisi responden penduduk Desa Gayau dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Umur responden pemanfaat hutan Reg. 20 Pematang Kabuato

Umur Responden (tahun)	Responden	(%)
20—30	4	12.5
31—40	9	28.125
41—50	4	12.5
> 50	15	46.875
Total	32	
Rata-rata (tahun)	50	

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gayau rata-rata merupakan golongan memasuki umur paro baya. Usia paro baya sebagian besar penduduk Desa Gayau menjadi informasi bahwa mereka berasal dari generasi awal masyarakat pemanfaat hutan di wilayah Reg. 20. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan Reg. 20 telah dilakukan oleh masyarakat lebih dari 50 tahun lalu atau pada periode tahun 1960-an.

Rata-rata pendidikan responden adalah pendidikan menengah pertama (8 tahun) meskipun banyak yang tidak sampai lulus SMP. Tingkat pendidikan menjadi indikator bahwa suatu masyarakat memiliki kesadaran pentingnya pendidikan dan perlunya keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Tabel 4. Pendidikan responden pemanfaat hutan kawasan Reg. 20 P. Kabuato

Pendidikan (tahun)	Responden	(%)
SD	9	28.125
SMP	11	34.375
SMA	12	37.5
Total	32	
Rata-rata	8	

Berdasarkan pekerjaan utamanya, responden di Desa Gayau sebagai besar adalah petani (>80%), 10% merupakan pedagang, dan sisanya adalah PNS dan pelaku industry pengolahan padi. Pertanian merupakan sumber pendapatan utama di wilayah penelitian. Usahatani yang banyak dilakukan adalah budidaya tanaman perkebunan yaitu: kakao, kopi, kelapa, dan sebagian kecil cengkih. Bahkan terdapat 12 responden yang hanya bergantung dari usahatani kakao di wilayah kawasan semenjak orang tua hingga generasi anaknya.

Tabel 5. Responden berdasarkan pekerjaan utamanya

Pekerjaan Utama	Responden	(%)
Petani	27	84.375
Pedagang	3	9.375
PNS	1	3.125
Industri penggilingan padi	1	3.125
Total	32	

Rata-rata lahan garapan yang dimiliki masyarakat Desa Gayau adalah 5,45 ha. Sebagian besar (>70%) kepemilikan lahan garapan kurang dari 1 ha. Kondisi kepemilikan lahan garapan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Lahan garapan responden pemanfaat hutan Reg. 20

Luas Garapan (ha)	Responden	(%)
< 0.5	11	34.375
0.51 -- 1.00	12	37.5
1.01--2.00	4	12.5
>2.00	5	15.625
Total	32	
Rata-rata	5.45	

Hasil survei menunjukkan bahwa 10 responden (31%) merupakan petani tanpa lahan garapan dan bekerja sebagai buruh tani. Upah buruh tani yang diterima per hari rata-rata sebesar Rp 43.000,- (Tabel 7). Besaran upah tersebut apabila kita kalkulasikan dengan 25 hari kerja berarti tingkat penerimaan buruh tani per bulan sebesar Rp 1.078.000,- lebih rendah dari besaran Upah Regional Propinsi Lampung tahun 2014 sebesar Rp 1.330.000,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi buruh tani harian sumber pendapatan yang diterima per bulan belum memadai dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila tingkat penerimaan per kapita per harinya kurang dari US \$ 2,- atau setara Rp 22.000,-/orang/hari (indikator Bank Dunia). Keluarga kecil dengan anak dua paling tidak harus memiliki tingkat pendapatan per bulan sebesar Rp 2.200.000,-. Artinya apabila rumah tangga buruh

tani di sekitar kawasan Reg. 20 masih memiliki pendapatan kurang dari nilai itu maka termasuk ke dalam golongan hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 7. Rata-rata tingkat upah harian di wilayah Reg. 20

Upah TK/hari (Rp)	Responden	(%)
30.000,-	6	18.75
30.000,- -- 40.000,-	7	21.875
40.000,- -- 50.000,-	18	56.25
55.000,-	1	3.125
Total	32	
Rata-rata	Rp 43.148	

Tabel 8. Jumlah anggota keluarga responden

Jumlah Anggota Keluarga (orang)	Responden	(%)
3—4	21	65.625
> 4	11	34.375
Total	32	
Rata-rata	5	
Rata-rata tanggungan keluarga >10 th	3	

Rata-rata anggota keluarga responden merupakan keluarga kecil dengan anak 1 sampai 2 orang (65%). Curahan kerja rata-rata responden adalah 6,45 jam per hari selama 5,5 hari per minggu. Rata-rata aktivitas usaha rumah tangga dilakukan oleh dua orang tenaga kerja yang dimiliki oleh rumah tangga (Tabel 9).

Tabel 9. Curahan kerja responden

Curahan Kerja	Jam/hari	Hari/minggu	dilakukan oleh berapa TK
Pertanian	7.2	5	3
Non Pertanian	5.7	6	1
Rata-rata curahan kerja per hari	6.45	5.5	2

Sumber pendapatan rumah tangga berasal dari aktivitas pertanian (usahatani di lahan garapan sendiri dan buruh tani), serta usaha di luar pertanian. Pendapatan rata-rata dari usahatani mencapai Rp 2.087.692,- per bulan. Pendapatan rata-rata buruh tani sebesar Rp 1.072.000,- per bulan. Pendapatan rata-rata dari usaha di luar pertanian mencapai Rp 1.028.571,- per bulan. Rata-rata pendapatan total responden per bulan hanya mencapai Rp 1.255.450,- per bulan atau Rp 15.592.174,- per tahun (Tabel 10).

Tabel 10. Pendapatan rumah tangga responden

Pendapatan RT	Rp/bulan	Responden
Pertanian (usahatani)	2.087.692.3	13
Pertanian (buruh tani)	1.072.000	10
Usaha di luar pertanian	1.028.571	14
Total pendapatan RT	1.255.454,5	
Rata-rata pendapatan pertahun	15.592.174	

Selain melakukan aktivitas produksi untuk menghasilkan sumber pendapatan, rumahtangga responden juga melakukan aktivitas konsumsi (pengeluaran) yang meliputi pengeluaran untuk kebutuhan pangan, non pangan, dan untuk kebutuhan usahatani. Berdasarkan rata-rata penerimaan rumahtangga sebesar Rp 15.592.000,- per tahun dan pengeluaran rumahtangga sebesar Rp 8.099.656,- per tahun maka rumah tangga responden masih memiliki alokasi untuk *saving* dan investasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa responden relatif memiliki tingkat penerimaan yang memadai dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun masih terdapat sekitar 30% buruh tani yang belum memiliki penghidupan yang memadai karena tidak memiliki akses terhadap lahan dan modal untuk sumber pendapatan rumahtangganya.

Peran hutan bagi masyarakat

Secara umum, keadaan infrastruktur cukup mendukung untuk melakukan aktivitas perekonomian. Kondisi infrastruktur dan jarak akan menimbulkan biaya transportasi yang bervariasi. Fasilitas infrastruktur di wilayah penelitian (Tabel 12).

Tabel 12. Fasilitas infrastruktur di wilayah penelitian

Fasilitas	
Puskesmas	Ada
Tenaga Medis	Ada
Jarak lokasi Faskes	1.128 km
Sekolah Dasar	3 unit
Sekolah Menengah Pertama	
Masjid	1
Mushola	6
Transportasi Umum	Angkutan Pedesaan Ojek sepeda motor
Komunikasi	HP, telpon rumah

Kelembagaan penunjang kegiatan usahatani di daerah penelitian adalah kelompok tani, Gapoktan, atau koperasi masih belum tersedia. Kios saprodi atau penangkar benih di desa ini juga belum ada. Begitu pula kelembagaan untuk pasca panen dan pemasaran masih sangat terbatas. Hanya terdapat satu unit RMU (rice m unit) dengan tempat penjemuran sederhana, peralatan pengolahan hasil maupun pasar hasil pertanian belum ada sama sekali. Keberadaan kelembagaan pendukung aktivitas agribisnis pedesaan sangat penting dalam mewujudkan sinergi bagi pengembangan wilayah perdesaan. Saat ini, di wilayah pertanian hanya dikenal kelembagaan sosialnya berwujud kelompok pengajian dan kelompok tani, tetapi baru 18,75% responden yang bergabung di kelompok pengajian dan mereka hanya sebagai anggota bukan pengurus kelompok.

Sebagian besar responden (71,87%) belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan, baik untuk materi pertanian, kehutanan, kesehatan, maupun, pendidikan. Penyuluhan terkait dengan pentingnya menjaga fungsi hutan sebagai sumber kehidupan sebagian besar belum pernah dirasakan oleh responden. Berdasarkan rekapitulasi pandangan responden terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memelihara hutan diketahui bahwa sebagian besar responden berpandangan bahwa hutan berperan penting bagi masyarakat (90%).

Sebagian besar responden (59%) menyebutkan bahwa hutan berperan penting sebagai sumber ekonomi. Hal ini artinya masyarakat menggantungkan sumber pendapatan dari hutan sebagai aktivitas mata pencarian utamanya. Motif ekonomi menjadi pendorong kuat masyarakat melakukan aktivitas produksi di

kawasan hutan. Hal ini senada dengan penelitian CIFOR (2000) yang menunjukkan bahwa kondisi krisis ekonomi, perubahan nilai mata uang dan, perubahan harga komoditi dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan bahkan dalam beberapa kasus tidak diinginkan bagi masyarakat yang ada di kawasan hutan dan bagi pengelolaan serta perlindungan hutan alam yang tersisa.

Sebagian besar responden (66%) menyatakan bahwa langkah menjaga hutan dapat dilakukan melalui upaya menanam pepohonan/kayu, tidak menebang kayu sembarangan, dan himbuan untuk tidak melakukan penebangan kayu. Namun masih terdapat 34% responden yang tidak tahu langkah menjaga hutan. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat keberadaan masyarakat kawasan hutan menimbulkan konsekuensi tanggung jawab untuk melestarikan hutan.

Rantai aktivitas ekonomi masyarakat pemanfaat hutan

Rantai aktivitas ekonomi masyarakat pemanfaat hutan di kawasan Reg. 20 dapat dikelompokkan dalam 3 aktivitas, yaitu: aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. *Depth interview* dilakukan dengan tokoh masyarakat meliputi: aparat desa, pemilik warung, pedagang, dan pelaku industri penggilingan padi. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa:

- a. Aktivitas produksi yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Reg 20 adalah usaha di bidang pertanian, meliputi usaha perkebunan kakao, kopi, kelapa, kemiri, dan cengkih. Produksi buah pisang, mangga, petai, jengkol, durian, dan kemiri menjadi hasil sampingan masyarakat sekitar hutan. Aktivitas produksi non pertanian yang terekam adalah penggilingan padi (RMU) ada satu unit di wilayah Desa Gayau yang dimiliki oleh warga Desa Gayau. Sementara itu, industri pengolahan skala rumah tangga yang terdeteksi adalah industri rumahtangga pembuat kripik pisang. Aktivitas pengolahan belum berkembang di Desa Gayau dan desa-desa lain di sekitar Reg. 20. Hasil produksi pertanian yang berasal dari pekarangan/kebun maupun kawasan dijual oleh petani dalam wujud *raw material*. Kondisi produksi primer hasil-hasil pertanian dan kehutanan oleh masyarakat di sekitar Reg. 20 berimplikasi kepada tingkat perolehan harga jual. Selain itu, pada aspek produksi pertanian dan kehutanan, masyarakat masih menghadapi masalah rendahnya produktivitas hasil perkebunan, akibat kurangnya pemeliharaan dan pasca panen yang baik. Praktik *good agriculture practiced* belum banyak diterapkan, padahal Prinsip *good agroforestry practiced* ini wajib menjadi landasan budidaya masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Aktivitas distribusi. Alir komoditas dari produsen hingga ke konsumen dilakukan oleh para pedagang sebagai lembaga pelaku rantai tataniaga produk dari masyarakat di Desa Gayau ke konsumen di pasar desa, kecamatan, maupun ke Kota Bandar Lampung. Sekitar 10% penduduk Desa Gayau memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, mulai dari pedagang pengumpul tingkat dusun, tingkat desa, hingga tingkat kecamatan. Selain itu, juga ada yang menjadi pedagang retail/eceran sekelas warung/toko desa.
- b. Aktivitas konsumsi. Konsumsi/pengeluaran rumahtangga masyarakat Desa Gayau secara khusus dan kawasan Reg. 20 secara umum digunakan untuk pengeluaran pangan, non pangan, dan untuk usahatani. Pengeluaran pangan digunakan untuk kebutuhan pokok beras, sayuran dan lauk-pauk. Pengeluaran non pangan digunakan untuk aktivitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan perlengkapan rumah tangga. Sementara itu, pengeluaran usahatani digunakan untuk pengadaan sarana produksi pertanian, seperti bibit, pupuk, tenaga kerja, peralatan pertanian hingga obat-obatan pertanian.

KESIMPULAN

1. Kondisi ekonomi sebagian penduduk (30%) di kawasan Reg. 20 menunjukkan bahwa mereka merupakan masyarakat yang belum sejahtera. Motif ekonomi mendesak masyarakat untuk melakukan aktivitas

eksplorasi hutan untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarganya, sehingga kesadaran penerapan prinsip *good agroforestry practiced* masih jauh bisa diterapkan masyarakat di sana.

2. Kondisi infratraktur sosial masyarakat di kawasan Reg. 20 masih belum memadai dalam mendukung upaya pelestarian hutan secara berkelanjutan. Organisasi kemasyarakatan belum terbentuk, dan masyarakat hanya mengandalkan pengorganisasian melalui aparat desa. Kondisi ini menyebabkan kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pelestarian hutan menjadi sulit.
3. Umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan, misal kakao, kopi, dll secara monokultur tanpa naungan dan belum melakukan upaya-upaya konservasi tanah dan air sebagai sumber pendapatan/ekonomi mereka. Kesadaran untuk melakukan aktivitas pelestarian hutan melalui penerapan prinsip *good agroforestry practiced* masih jauh dari harapan.
4. Aliran aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Reg. 20 meliputi: aktivitas produksi (pertanian dan kehutanan), distribusi (pedagang pengumpul, lembaga pemasaran, agen, dan retailer/pengecer), dan aktivitas konsumsi yang digunakan untuk alokasi pengeluaran pangan, non pangan, dan usahatani.

SARAN

1. Pengawasan dan pengawalan integral implementasi Permenhut No: KPHL47/2013 mutlak dilakukan. Keterlibatan instansi pemerintah dalam hal ini KPHL dan Dinas Kehutanan dengan stakeholders sebagai pihak ketiga (Masyarakat setempat, BUMN/D/S, Koperasi, UMKM) perlu mewujudkan dalam skema kerja yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Orientasi ekonomi semata tidak dibenarkan. Penerapan praktik *good agroforestry practiced* wajib menjadi acuan dalam praktik eksplorasi hutan.
2. Pembinaan masyarakat pemanfaat hutan hanya dapat dilakukan secara efisien dan efektif melalui organisasi kelembagaan mulai dari level petani, hingga aparat desa, kecamatan, bahkan melibatkan organisasi non-profit yang peduli terhadap keberlanjutan hutan. Partisipasi masyarakat sekitar kawasan hutan dapat dimobilisasi secara efektif dalam memperbaiki praktik *good agroforestry practiced* melalui kelembagaan yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2000. Dampak krisis ekonomi di Indonesia terhadap petani kecil dan tutupan hutan alam di luar Jawa. *Ocasional paper No. 28. June. 2000*
- Alam, Syamsu (2008). Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dengan Konversi Hutan Rakyat Menjadi Areal Perladangan Berpindah (Studi Kasus Petani Hutan Kemiri Rakyat Kabupaten Maros). *Jurnal Hutan dan Masyarakat*,2(3): 280-289
- CIFOR. 2000. Laju Penyebab Deforestasi di Indonesia. *OCCASIONAL PAPER NO. 28 June 2000.*
- Effendi Rachman, Indah Bangsawan, and Muhammad Zahrul M. 2007. Kajian pola-pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi dalam mencegah illegal logging. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 4 No. 4 Desember 2007.*
- FAO. 1996. *Forest Resources Assessment 1990: Survey of Tropical Forest Cover and Study of Change Processes.* FAO Forestry Paper 130. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Bina Unteawati, Fitriani, dan M. Zaini: Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Hutan Lindung...

Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KKPHL) Kab. Pesawaran. 2014. Konsultasi Publik. Materi audiensi konsultasi publik. Februari 2014

Koran Editor.com. 2014. 80 persen hutan Pesawaran rusak. <http://www.koraneditor.com>. Edisi Kamis, 27 Februari 2014

Subarna, Trisna. 2011. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 8 No. 4 Desember 2011, Hal. 265 – 275

Sunderlin, William D., Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Edy Rianto dan Arild Angelsen. 2000. Dampak Krisis Ekonomi Indonesia terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar Jawa. Center For International Forestry Research (CIFOR). OCCASIONAL PAPER NO. 28 June 2000

Sylviani, 2008. Kajian dampak perubahan fungsi kawasan hutan terhadap masyarakat sekitar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 5 No. 3 September 2008.

Zulaifah, Siti. 2006. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Hutan Regaloh Di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Tesis. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang.